

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Rukun Warga di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi

Bayu Septiansyah^{1*}

Corresponding Author: bayuseptiansyah87@gmail.com

^{1*}Universitas Jenderal Achmad Yani

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i2.39972

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Rukun Warga Empowerment Program (P2RW) in Cikole Subdistrict, Sukabumi City, in 2021. The program represents a local government initiative to enhance citizen participation by allocating direct financial assistance to each neighborhood unit (RW) for micro-scale development projects. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and were examined using Miles and Huberman's interactive model. The findings are analyzed based on Dunn's (2015) six policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that while the program generally met its goals, several challenges remain, including limited citizen involvement in planning, insufficient outreach, and budget constraints. This study contributes to public policy evaluation literature at the sub-district level and highlights the importance of transparency, accountability, and local capacity-building in the implementation of community empowerment programs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada tahun 2021. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui pemberian bantuan keuangan langsung kepada setiap RW untuk pembangunan skala mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2015): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa secara umum tujuan program tercapai, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala partisipasi warga yang terbatas dalam tahap perencanaan, lemahnya sosialisasi, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi evaluasi kebijakan publik pada tingkat kewilayahan dan menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Keywords

Evaluasi kebijakan, partisipasi warga, pembangunan lokal, pemberdayaan masyarakat, Rukun Warga

Article History

Received February, 18

Revised June, 20

Accepted June, 22

Published June, 23

Corresponding Author

Bayu Septiansyah,
Univ. Jenderal Achmad Yani,
Jl. Terusan Jenderal Sudirman,
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40525

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap warga negara berhak pelayanan dari para pejabat maupun berbagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan publik. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih banyak ditemui penyimpang yang dapat di buktikan dari banyaknya laporan pengaduan tentang maladmistrasi yang di lakukan oleh penyelenggara kebijakan publik yang di duga mengandung kebenaran (Sihombing, 2018).

Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Basir et al., 2019).

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya masih adanya kesenjangan sosial yang belum dapat dipecahkan. Salah satu bentuk masalah sosial yang saat ini masih mengemuka di banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan kemiskinan (Bintoro et al., 2020). Secara umum kemiskinan ialah satu keadaan dimana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat modern, kemiskinan biasanya diartikan dengan masalah kekurangan uang. Di Indonesia, walaupun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan nasional, dan didalamnya juga terdapat program pengentasan kemiskinan, akan tetapi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin masih cukup besar (Haedar, 2019).

Evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan (Khothimah & Hertati, 2021). Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dapat dipahami bahwa suatu kebijakan merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (Praja et al., 2020).

Bentuk program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Sukabumi adalah pemberian stimulan kepada setiap tingkatan rukun warga yang ditujukan untuk memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian Visi Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera".

Merujuk pada Kebijakan Walikota Sukabumi nomor 188.45/151-PEM/2021 tahun 2021 secara umum bentuk kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana hibah P2RW ini meliputi kegiatan pembangunan lingkungan fisik dasar dan sarana penunjang yang bersifat sederhana, dapat menggali partisipasi masyarakat yang tinggi, dibutuhkan oleh masyarakat dan memenuhi persyaratan yang berlaku seperti prioritas untuk masyarakat miskin atau lingkungan kumuh, kemanfaatan hasil kegiatan, jumlah pengguna manfaat/hasil kegiatan, luas cakupan wilayah dari hasil kegiatan dan lain sebagainya yang tidak terakomodir dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun sasaran dalam penggunaan dananya sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan memperhatikan permasalahan kondisi lingkungan fisik setempat, kebutuhan, dan prioritas masing-masing RW yang ada di Kota Sukabumi.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari munculnya kebijakan tersebut tak lebih ialah untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap pembangunan di lingkungannya karena

keinginan dan aspirasi masyarakat akan terus menerus bermunculan seiring dengan perkembangan yang ada. Pada dasarnya P2RW ini sekilas hampir mirip dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimana sasaran kegiatannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, namun sasaran kegiatan yang dilakukan lebih fokus kepada pembangunan fisik dan pengadaan barang untuk menunjang kegiatan Rukun Warga serta peran aktif masyarakat di dalamnya.

Dalam penerapannya, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) ini sudah terealisasi di 68 RW yang ada di Kecamatan Cikole selama tahun 2021. Sebagaimana tertera dalam Petunjuk Teknis (Juknis) P2RW bahwa dana program bersumber pada APBD dengan peruntukan untuk tiap RW yakni Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Sesuai dengan tujuannya maka bantuan dana melalui, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di tingkatan RW untuk memecahkan masalah yang terjadi dilingkungannya melalui metode pemberdayaan.

Meskipun Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) sudah terealisasi diseluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cikole, permasalahan yang ditimbulkan yakni berkaitan dengan out-put atau hasil akhir yang diharapkan dari adanya Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terhadap permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan sekitar. Disisi lain kurang efektifnya pelaksanaan P2RW ditunjukan dengan kurang maksimalnya pelaksana dalam hal ini pemerintah untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan dibidang fisik, bidang sosial budaya, maupun bidang pemerintahan.

Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan diadakannya P2RW yang dicetuskan sejak tahun 2014 oleh Wali Kota Sukabumi, dimana sepanjang tahun 2021 pelaksanaan P2RW belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi masyarakat yang tidak terlalu peka terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungannya di tingkat RW menunjukan kurang efektifnya P2RW tersebut sehingga perlu dilakukan langkah evaluasi. Evaluasi terhadap program atau kebijakan P2RW tentunya sangat penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dalam penerapan P2RW untuk diperbaiki sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui metode pemberdayaan dapat tercapai.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berfokus menganalisa evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi pada tahun 2021 dengan mengacu pada enam indikator kebijakan publik sebagaimana dirumuskan oleh Dunn (2015). Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas administratif program, tetapi juga untuk memahami dinamika partisipasi warga, keadilan distribusi bantuan, dan respons pemerintah terhadap kebutuhan lokal di tingkat mikro.

Adapun penelitian ini menggunakan tinjauan penelitian terdahulu sebagai acuan sekaligus untuk menunjukan adanya pembaharuan penelitian yang ditawarkan. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul "Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Desa Batuma'lonro Kecamatan Baringbulu di Kabupaten Gowa" (Basir et al., 2019), penelitian terdahulu yang kedua berjudul "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD di Kota Daya Jakarta

Pusat)” (Silitonga, 2018), penelitian terdahulu ketiga berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan” (Sartika, 2011), penelitian terdahulu keempat berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Siau Timur” (Katuhu 2019), penelitian terdahulu yang kelima berjudul “Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Program Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mekar Jaya Depok” (Ray & Surtyani, 2020), dan penelitian terdahulu yang terakhir berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Soedarto et al., 2008).

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan yang menjadi perbedaan sekaligus menunjukkan adanya pembaharuan penelitian yang ditawarkan yakni pada fokus kebijakan pemberdayaan di tingkatan Rukun Warga (RW) dengan lokusnya yaitu di Kota Sukabumi. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang evaluasi kebijakan Pemberdayaan Rukun Warga dengan studi kasus di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi pada tahun 2021.

Dengan berpatokan pada keterbatasan literatur-literatur terdahulu di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui fokus evaluatif terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW), yang selama ini jarang menjadi objek utama dalam kajian evaluasi kebijakan publik. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang menyoroti program makro-skala seperti PNPM, penelitian ini mengkaji dimensi kebijakan publik secara mikro dengan pendekatan kontekstual, yakni melalui kombinasi indikator evaluasi Dunn dan konsep pemberdayaan dalam ruang urban. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai efektivitas program pembangunan berbasis kewilayahan di kota-kota menengah di Indonesia.

Guna mempermudah bahasan, tulisan ini disusun ke dalam enam bagian utama. Bagian pertama menyajikan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua menjelaskan kerangka teoritis, dengan penekanan pada indikator evaluasi Dunn dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bagian ketiga menguraikan metode penelitian, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan, yang disusun berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan. Bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan mengaitkannya dengan relevansi teoritis serta praktik kebijakan. Terakhir, bagian keenam memuat saran untuk pengembangan penelitian lanjutan dan implikasi kebijakan.

Kerangka Analisis

Dalam menganalisis kebijakan publik, evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikannya. Evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi untuk mengukur kinerja administratif, tetapi juga untuk memahami dampak sosial, keadilan distribusi, dan kualitas tata kelola yang dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dilakukan dengan mengacu pada dua kerangka konseptual utama, yaitu indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015) dan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Kedua kerangka ini dipilih untuk

memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik secara normatif maupun sosiologis, terhadap pelaksanaan program di tingkat RW.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sangatlah penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan tersebut di implementasikan. Dunn (2000:608) menerangkan bahwa Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembelaan angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino 2014:185) menyebutkan bahwa “evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilakukan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”. Selanjutnya menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan.

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini berdasarkan kata kunci yang sering kita temukan yaitu di antaranya adalah pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil dan dampak. Dilihat dari urgensi pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994: 63) bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (*goals*) dan kriteria (*criteria*). *Goals* merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa *goals* ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Adapun indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) terdiri dari enam tipe utama yaitu; Efektivitas (*effectiveness*), Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*adequacy*), Kriteria perataan, Responsivitas (*responsiveness*); dan Kriteria ketepatan (*appropriateness*).

Dalam konteks evaluasi Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kecamatan Cikole, keenam indikator evaluasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Dunn (2015) dioperasionalkan secara kontekstual agar dapat digunakan untuk menilai kinerja dan dampak program secara menyeluruh. Pertama, efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan utama program, yakni peningkatan kualitas lingkungan fisik dan partisipasi warga dalam Pembangunan, dapat tercapai secara nyata. Indikator ini mencerminkan keberhasilan program dalam mewujudkan hasil yang diharapkan di tingkat komunitas. Kedua, efisiensi menilai kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan, khususnya dalam hal pemanfaatan dana dan alokasi waktu oleh pengurus RW. Evaluasi efisiensi penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga dilaksanakan dengan biaya dan proses yang proporsional.

Ketiga, kecukupan digunakan untuk mengkaji apakah program mampu menjawab permasalahan substantif yang dihadapi warga, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, sistem drainase, atau ketersediaan fasilitas sosial yang memadai. Keempat, pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat program di antara RW yang berbeda, dengan fokus pada keadilan alokasi anggaran dan kesetaraan akses terhadap proyek pembangunan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa tidak ada RW yang secara sistematis terpinggirkan dalam proses atau hasil program. Kelima, responsivitas menilai sejauh mana program mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tidak hanya pada tahap pelaksanaan tetapi juga dalam tahap perencanaan. Responsivitas menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat sensitivitas kebijakan terhadap masukan dari warga sebagai penerima manfaat langsung.

Terakhir, ketepatan mengacu pada kesesuaian antara program dan konteks sosial budaya masyarakat lokal, termasuk bagaimana P2RW diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Kota Sukabumi secara keseluruhan. Ketepatan juga mencerminkan kemampuan program dalam menjawab tantangan lokal dengan strategi yang relevan dan kontekstual. Keenam indikator ini membentuk kerangka evaluatif yang bersifat normatif, namun dapat diturunkan secara empiris melalui sejumlah indikator turunan. Data empiris tersebut dapat diperoleh dari persepsi warga, tingkat pelibatan stakeholder, efektivitas koordinasi antarlevel, serta dokumentasi resmi pelaksanaan program. Dengan demikian, kerangka ini memberikan panduan sistematis bagi analisis evaluatif yang berbasis pada data lapangan dan pertimbangan kontekstual yang konkret.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kritis

Selain evaluasi teknokratik, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dari pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan komunitas dalam mengontrol keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Zimmerman, 2000). Dalam konteks pembangunan lokal, pemberdayaan tidak sekadar melibatkan partisipasi warga sebagai pelaksana proyek, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan agenda pembangunan itu sendiri.

Beberapa literatur mengkritik praktik pemberdayaan yang bersifat simbolik atau semu (Arnstein, 1969; Cooke & Kothari, 2001), di mana partisipasi warga hanya digunakan untuk legitimasi formal, tanpa memberi ruang pengaruh nyata terhadap kebijakan. Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan sering kali tersendat oleh keterbatasan informasi, relasi patron-klien, dan ketimpangan kapasitas antar wilayah (Sumarto & Suryahadi, 2019).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Suyamardi (2010:57) pemberdayaan diartikan sebagai: “proses melepaskan situasi atau ketekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan atau *powerless*”.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Totok, 2015). Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu, pendekatan evaluasi terhadap program seperti P2RW perlu memperhatikan aspek kualitas partisipasi, proses deliberasi warga, dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Berdasarkan pedoman petunjuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) adalah salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk memberdayakan masyarakat pada tingkat Rukun Warga. Sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) maka adapun kegiatan P2RW tersebut diarahkan pada; (a) peningkatan peran serta masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, (b) pengaturan arah dan batasan penggunaan dana yang lebih detail dan terintegrasi, (c) peningkatan kesesuaian dengan kebutuhan dan permasalahan setempat, (d) peningkatan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi, (e) kesesuaian dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, (f) peningkatan peran dan kewenangan pada kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat, dan (g) peningkatan peran kecamatan dalam fungsi fasilitator, monitoring, dan evaluator.

Berdasarkan laporan evaluasi yang dijelaskan oleh Wali Kota Sukabumi dari 355 RW yang total dana hibahnya mencapai 7,1 miliar, penyerapan telah dilakukan dengan baik sebanyak 100 persen pada tahun 2021 sehingga pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2022 mendatang. Namun hal tersebut dapat kita kaji kembali dengan seksama terhadap evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga tahun 2021. Berikut ini akan diuraikan secara rinci mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) khususnya di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan teori indikator evaluasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Dunn (2015:309) yang terdiri dari enam tipe utama yaitu; efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), kriteria perataan, responsivitas (*responsiveness*); dan kriteria ketepatan (*appropriateness*).

Melalui integrasi kedua kerangka tersebut—indikator evaluasi kebijakan Dunn dan konsep pemberdayaan masyarakat—penelitian ini berupaya tidak hanya menilai kinerja administratif program P2RW, tetapi juga menganalisis kualitas relasi antara negara dan warga di tingkat mikro. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada pemahaman yang lebih reflektif dan kontekstual terhadap makna kebijakan pemberdayaan dalam praktik pemerintahan lokal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dan menguraikan fenomena kebijakan rukun warga di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Creswell Penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok untuk masalah sosial atau manusia (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap konteks kebijakan, interaksi sosial antar aktor, serta persepsi warga terhadap efektivitas dan dampak program. Studi kasus dipandang relevan untuk mengkaji kebijakan yang bersifat kontekstual, lokal, dan kompleks, sebagaimana karakteristik program P2RW yang beroperasi pada tingkat mikro-kewilayahan.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (Asbar FR & Witarsa R,

2020). Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan program P2RW. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan tematik yang disusun berdasarkan enam indikator evaluasi dari Dunn (2015). Selain wawancara, teknik observasi lapangan terhadap proyek fisik hasil P2RW dan studi dokumentasi terhadap SK Walikota, laporan pelaksanaan, serta proposal RW juga dilakukan untuk memperkuat validitas data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Seperti yang diungkapkan oleh King, Kohen dan Verba (King et al., 1995) bahwa dalam proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan terhadap fokus evaluasi, diikuti dengan penyajian data dalam bentuk matriks tematik berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada triangulasi sumber dan keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka teori.

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data antar informan dan antar jenis sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen). Teknik member checking juga digunakan, yaitu dengan meminta konfirmasi dari informan kunci terhadap ringkasan hasil wawancara yang telah diolah. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian kualitatif, termasuk pemberian informasi mengenai tujuan dan manfaat penelitian kepada para informan, serta memperoleh persetujuan sukarela (*informed consent*) sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan analisis akademik.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan yang dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penyajian hasil dilakukan secara tematik dengan menggabungkan data empiris dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkannya dengan kerangka teori evaluasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan Program P2RW, baik dari sisi pencapaian administratif maupun dari aspek sosial, partisipatif, dan kontekstual.

Efektivitas Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam proses evaluasi suatu kebijakan maka perlu diketahui terkait efektivitas program tersebut dalam penerapannya. Efektivitas atau tidaknya suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh kesesuaian antara pelaksanaannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan

dengan penelitian yang diangkat maka efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana penerapan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) khususnya di 68 RW yang ada di Kecamatan Cikole dengan tujuan awal program terbentuk yakni menjadikan masyarakat yang lebih partisipatif dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakn P2RW ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi serta dalam pembangunan fasilitas sebagaimana tujuan Pemerintah Daerah. Di sisi lain kebijakan yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam hal pembangunan yang terjadi di Kota Sukabumi karena masyarakat sendiri yang tahu apa yang menjadi kebutuhan di wilayahnya, karena apabila Pemerintah mengambil peran secara langsung untuk melakukan pembangunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti tidak tepat sasaran nya pembangunan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di wilayah masyarakat tersebut.

Secara umum, tujuan P2RW sebagai program pembangunan berbasis komunitas dinilai tercapai. Mayoritas RW berhasil merealisasikan kegiatan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran air, serta renovasi posyandu. Namun demikian, efektivitas partisipatif masih terbatas. Beberapa warga tidak mengetahui adanya forum perencanaan atau hanya dilibatkan secara simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian fisik belum sepenuhnya disertai oleh penguatan kapasitas warga sebagai subjek pembangunan, sebuah aspek penting dalam pendekatan pemberdayaan.

Mengacu dari teori Indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) maka salah satu yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dikatakan sesuai adalah indikator Efektivitas (*effectiveness*). Berkaitan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa penerapan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) sudah efektif khususnya di Kecamatan Cikole karena selain sudah terealisasi di 68 RW juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam beberapa agenda Pemerintah Daerah seperti perbaikan fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari diterapkannya P2RW yakni meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungannya dimulai dari tingkatan RW. Oleh karena itu maka secara umum dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan rukun warga khususnya di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sudah memenuhi indikator efektivitas dalam penerapannya selama tahun 2021.

Efisiensi Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam konteks evaluasi suatu kebijakan atau program maka efisiensi menjadi salah satu indikator yang perlu diuji apakah kebijakan tersebut efisien atau sebaliknya. Efisien dalam konteks penerapan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) berkaitan dengan bagaimana anggaran dipergunakan oleh masyarakat secara kelompok untuk hal-hal yang sesuai dengan peruntukannya. Dalam artian bahwa nominal Rp. 20.000.000 yang didapat oleh warga di tiap RW dapat dipergunakan sebaik dan setepat mungkin untuk kebutuhan seluruh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan bisa dilihat dari pengelolaan dana atau fasilitas yang diberikan dengan penggunaannya di tingkatan RW, dengan melihat tujuan utama dari program ini yaitu pemenuhan tuntutan pembangunan dilingkungannya yang belum

terakomodir, penulis melihat dalam skala pembangunan yang ada ditingkat rukun warga ini bisa terpenuhi dengan adanya program ini, mulai giatnya pembangunan secara fisik ini menandakan program ini cukup efektif dan efisien dilakukan, akan tetapi kebijakan ini hanya sebagai salah satu solusi atau jalan pintas dalam hal pemenuhan kebutuhan pembangunan di masyarakat. Bila melihat dari ketentuan serta syarat pembangunan yang ditetapkan program ini sama saja seperti program pembangunan yang sudah terlebih dahulu dilakukan, akan tetapi kembali melihat sisi positif dari program ini adalah bagaimana pencapaian kebijakan ini cukup baik apabila dilihat dari segi pembangunan secara fisik.

Mengacu dari teori Indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) maka salah satunya indikator efisien harus terpenuhi agar program pemberdayaan rukun warga (P2RW) dapat dikatakan tepat. Berkaitan dengan penelitian ini maka P2RW dapat dikatakan sudah efisien karena dari 68 RW yang ada di Kecamatan Cikole, hampir seluruhnya menggunakan anggaran atau fasilitas dari program untuk hal-hal yang sesuai seperti perbaikan fasilitas masjid, kebutuhan olahraga di RW maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil analisa teoritis tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) sudah memenuhi indikator efisiensi, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat baik untuk perbaikan atas masjid, perbaikan posyandu, perbaikan gorong-gorong dan perbaikan fasilitas masyarakat lainnya yang ada di lingkungan RW.

Kecukupan Penggunaan Anggaran Pada Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam proses evaluasi program pemberdayaan rukun warga (P2RW) maka perlu juga diketahui kecukupan dari anggaran yang diturunkan kepada tiap RW yang ada di Kota Sukabumi. Pada tahun 2021 para Rukun Warga atau RW telah mendapatkan bantuan sebesar Rp, 20.000.000 per tahunnya, dengan jumlah dana yang diberikan tentunya terdapat dampak yang bisa saja dimungkinkan terjadi. Kecukupan berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh warga di tiap RW dengan jumlah yang didapatkan yakni Rp, 20.000.000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang diturunkan kepada warga melalui program pemberdayaan warga (P2RW) dengan nominal Rp, 20.000.000 dirasa cukup untuk membantu serta meningkatkan partisipasi warga sampai di tingkat RW atas beberapa permasalahan yang ada di lingkungannya. Meskipun ada keinginan baik dari pelaksana maupun masyarakat untuk terus menambah jumlah anggaran yang ada setiap tahunnya.

Jika mengacu pada teori indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) maka salah satu indikator yang harus terpenuhi yakni kecukupan (*adequacy*). Berkaitan dengan penelitian ini maka kecukupan berkaitan dengan anggaran P2RW yang disalurkan kepada 355 RW yang tersebar di Kota Sukabumi selama tahun 2021, yang mana anggaran tersebut selain sudah tersalurkan juga mencukupi untuk kebutuhan mikro masyarakat di tingkat RW sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

Meskipun demikian dalam kebijakan P2RW ini penulis melihat dari sisi kecukupan anggaran masih kurang dikarenakan memang aspek pembangunan di Kota Sukabumi tidaklah semata terwujud dalam satu kebijakan saja dan dengan melihat dari jumlah RW yang ada di Kota Sukabumi berbanding dengan jumlah dana yang diberikan, karena didalam lingkungan RW disini

masih ada RT di bawahnya ini akan menjadi perhatian lagi bila mana setiap wilayah RT disini masih belum mendapat bagian atau jatah untuk membangun apa yang dibutuhkan dilingkungannya tetapi ini bisa saja terwujud apabila program ini terus berlanjut setiap tahunnya sampai seluruh tuntutan masyarakat dalam hal pembangunan terpenuhi, akan tetapi ini menjadi suatu yang sulit untuk diwujudkan dan perlu waktu yang sangat lama apabila memang perlu direalisasikan.

Oleh karena itu maka dirasa perlu adanya peningkatan anggaran P2RW di tahun selanjutnya agar dapat berkecukupan serta dapat dimanfaatkan lebih oleh masyarakat di tingkat RW. Berdasarkan hasil wawancara dan analisa penulis tersebut maka secara umum dapat dianalisis bahwa alokasi anggaran P2RW selama tahun 2021 sudah berkecukupan namun perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di tingkat RW maupun kecamatan.

Perataan Penyaluran Anggaran Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam rangka evaluasi program pemberdayaan rukun warga maka perlu dianalisa lebih jauh terkait dengan perataan penyaluran anggaran ke seluruh RW yang ada di Kota Sukabumi dengan dominal anggaran Rp. 20.000.000 per tahun 2021 sesuai dengan telah ditetapkan. Kebijakan P2RW dapat dikatakan tepat apabila sudah tersalurkan ke 355 RW yang ada di Kota Sukabumi termasuk yang ada di Kecamatan Cikole.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan penyaluran anggaran P2RW kepada seluruh RW yang ada di Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan evaluasi suatu kebijakan maka perlu dilihat dari faktor perataan dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan teori indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) salah satunya indikator perataan. Berkaitan dengan penelitian ini maka perataan berkaitan dengan penyaluran anggaran 20 juta kepada 355 RW yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi termasuk di Kecamatan Cikole.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka secara umum dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan rukun warga (P2RW) sudah memenuhi indikator pemerataan. Hal ini ditunjukkan dengan tersalurkannya anggaran Rp. 20.000.000 di 355 RW di 7 Kecamatan yang ada di Kota Sukabumi dan juga telah menunjukkan progresifitas penggunaan anggaran yang cukup tepat untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di RW seperti perbaikan masjid, perbaikan jalan, dan kegiatan RW lainnya dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan tujuan diluncurkannya P2RW.

Responcivitas Pelaksana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam proses evaluasi suatu kebijakan maupun program maka perlu diketahui juga bagaimana respon dari para pelaksana terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Begitupun dengan proses evaluasi P2RW perlu diketahui bagaimana bagaimana dinamika yang terjadi dilapangan dan saja kendala dalam penerapannya selama tahun 2021 serta bagaimana respon pelaksana P2RW dalam menghadapi hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumitahun 2018-2023, Pemerintah Kota Sukabumi menerbitkan kebijakan Program Pemberdayaan Rukun Warga atau yang disebut dengan P2RW. Melalui program ini diharapkan dapat terciptanya pemerataan pembangunan sampai di tingkat kewilayahan Rukun Warga (RW) dengan bantuan dana senilai dua puluh juta rupiah yang menggunakan metode pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan Program Pembangunan Rukun Warga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil observasi penulis di lapangan maka secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) telah memenuhi indikator responsivitas (*responsiveness*). Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran dari pelaksana akan kurangnya kualitas SDM pelaksana program sehingga dari hasil evaluasi yang dilakukan diharapkan adanya upaya perbaikan sehingga peningkatan partisipasi masyarakat sebagai tujuan utama dari P2RW dapat tercapai. Di sisi lain upaya untuk meningkatkan anggaran P2RW yang oleh pelaksana dinilai masih kurang merupakan bentuk respon terhadap pelaksanaan di lapangan dan keluhan masyarakat.

Kebijakan ini memang tepat bila dikaitkan dengan pembangunan, dan bagaimana memberdayakan masyarakat secara keseluruhan serta peran aktif masyarakat di dalamnya apalagi sasaran dari kebijakan ini pun tetap ditentukan tetap oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan memperhatikan permasalahan kondisi lingkungan fisik setempat, kebutuhan dan prioritas masing-masing RW. Ini menandakan ketika ada suatu pembangunan yang tidak sesuai dengan usulan sebelumnya, bukan berarti tidak diperbolehkan akan tetapi lebih mengutamakan dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, karena memang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terkadang ada hal yang bersifat tidak terduga atau diluar perkiraan penaksiran pemberian angka ataupun prediksi manfaat yang dirasakan akan lebih luas dalam pemanfaatannya.

Mengacu dari teori Indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) maka suatu program dapat dikatakan sesuai apabila telah memenuhi salah satu indikator yaitu responsivitas (*responsiveness*). Terkait penelitian ini maka indikator responsivitas ini berkaitan dengan tingkat kepekaan dari para pelaksana P2RW. Sejauh mana pelaksana memahami permasalahan yang ditemukan dilapangan serta bagaimana menyelesaikannya.

Ketepatan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2021

Dalam upaya melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka perlu untuk diketahui apakah program atau kebijakan tersebut tepat sasaran dan tepat guna atau sebaliknya. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ketepatan sasaran dari program pemberdayaan rukun warga (P2RW) yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggaran P2RW dianggap sudah sangat tepat sasaran dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Di sisi lain dari hasil observasi yang peneliti lakukan juga diketahui bahwa selama tahun 2021 hampir semua RW yang ada di Kecamatan Cikole secara merata telah menerima anggaran P2RW dan dipergunakan untuk

beberapa hal umum seperti perbaikan fasilitas umum di RW. Fenomena yang ada di lapangan memperkuat pandangan dari informan bahwa anggaran P2RW telah disalurkan dengan tepat dan berdampak pada partisipasi dari masyarakat yang masif.

Mengacu dari teori Indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015:309) maka suatu program dapat dikatakan sesuai apabila telah memenuhi salah satu indikator yaitu ketepatan. Terkait penelitian ini maka indikator ketepatan ini berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan anggaran P2RW oleh masyarakat di tingkatan RW. Sebagaimana hasil wawancara dan analisa di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Rp. 20.000.000 oleh para warga di tingkat RW sudah tepat sasaran dan tepat guna.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang diterapkan selama tahun 2021 khususnya di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sudah tepat. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui indikator yaitu:

- 1) Kebijakan P2RW dapat dikatakan sudah efektif karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal diadakannya P2RW yakni meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Penggunaan anggaran P2RW oleh masyarakat di tingkat RW sudah tergolong efisien karena sesuai dengan nominal yang didapat yakni Rp. 20.000.000.
- 3) Anggaran P2RW cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan publik masyarakat di tingkatan RW serta mampu untuk mendorong masyarakat untuk berkontribusi salah satunya dalam hal perbaikan fasilitas RW.
- 4) Penyaluran anggaran P2RW yang dilakukan sudah merata di 355 RW yang ada di Kota Sukabumi termasuk di Kecamatan Cikole sepanjang tahun 2021, sehingga memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat secara menyeluruh.
- 5) Tingkat responivitas dari para pelaksana di lapangan cukup baik sehingga mampu memahami apa saja yang menjadi kendala serta keluhan masyarakat dalam rangka penerapan P2RW.
- 6) Program pemberdayaan rukun warga (P2RW) yang diterapkan selama tahun 2021 sudah tepat sasaran dan tepat guna karena dapat dirasakan oleh 355 RW yang ada serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) jika merujuk pada yang dilaksanakan di Kota Sukabumi maka dapat menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan sebagai landasan dari kebijakan maupun program sejenis. Dengan begitu maka akan banyak kebijakan turunan di daerah yang dapat dijabarkan ke dalam program yang secara langsung melibatkan masyarakat di tingkatan RW sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh DPR RI juga dapat membangun kesadaran bagi masyarakat di tingkatan terendah seperti RW akan pentingnya partisipasinya dalam pembangunan maupun penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa aspek kecukupan dan pemerataan masih memerlukan perhatian. Dana yang relatif kecil belum mampu menyelesaikan kebutuhan struktural lingkungan yang lebih besar, sementara skema alokasi dana yang seragam

antar RW belum mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan lokal secara adil. Responsivitas program terhadap aspirasi warga juga bersifat variatif, tergantung pada dinamika sosial dan kapasitas pengurus RW. Sementara itu, dari sisi ketepatan, program telah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan partisipatif Kota Sukabumi, meskipun koordinasi lintas sektor antar OPD masih menjadi tantangan.

Secara konseptual, temuan ini mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada keberhasilan fisik, tetapi juga pada kualitas proses partisipatif, legitimasi sosial, dan kapasitas kelembagaan lokal. Evaluasi terhadap program seperti P2RW perlu memperhitungkan dimensi sosial-politik dan nilai-nilai komunitas yang hidup dalam ruang kewilayahan, agar kebijakan benar-benar mencerminkan semangat pemberdayaan yang otentik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa arah pengembangan studi ke depan dapat diusulkan. Pertama, diperlukan studi longitudinal untuk menilai keberlanjutan dampak P2RW terhadap kapasitas sosial, kelembagaan RW, serta perubahan pola partisipasi warga dari waktu ke waktu. Kedua, studi perbandingan antar-kecamatan atau antar-kota dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai efektivitas model pemberdayaan berbasis kewilayahan di berbagai konteks sosial dan geografis. Ketiga, pendekatan partisipatif dalam penelitian—misalnya melalui *participatory action research*—perlu dikembangkan agar warga tidak hanya menjadi objek evaluasi, tetapi juga menjadi subjek dalam perumusan indikator keberhasilan. Keempat, aspek komunikasi publik dan transparansi anggaran juga layak diteliti lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan *trust* warga terhadap RW dan pemerintah daerah. Dengan mengembangkan kajian pada bidang-bidang tersebut, kontribusi akademik terhadap studi evaluasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih memperkuat relevansi kebijakan pembangunan lokal yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Referensi

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arini, N., F., & Rostyaningsih, Dewi. (2008). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Studi Kasus di Sanggar Batik Semarang 16). *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 143-159.
- Asbar FR, & Witarsa R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3, 225–236.
- Basir, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma'Lonro. *JPPM: Journal of Public Policy and*, 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/327111117.pdf>
- Bintoro, R., F., A., Karim, A., & Enos Peselle. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(1), 1-9
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dikson, Silitonga. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat). *Administrasi Publik*, 21(July), 1–23.
- Haedar. (2015). Evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri

- perdesaan di kelurahan kabonga besar kecamatan benawa kabupaten donggala. *E-Journal Katalogis*, 3(5), 39–47.
- Katuhu, O. (2010). *Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Di Kecamatan Siau Timur*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 1–21.
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1995). The Importance of Research Design in Political Science. *American Political Science Review*, 89(2), 475–481. <https://doi.org/10.2307/2082445>
- Praja, J., S., Rumbekwan, M., Ibrahim, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Ilmiah Waban Bakti Praja*, 10(1), 266–279.
- Ray, R., I., W., & Sutyani, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Depok. *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*, 6(2), 27-45.
- Sartika. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 111–124.
- Sihombing, F., D., & Bangun, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Ombudman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Sumatera Utara. *Jurnal Message Komunikasi*, 11(1), 23–33.
- Sitonga, Dikson. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat). *Jurnal Esensi*, 21(2), 47-65.
- Sumardi, I Nyoman. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tobing, D., hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya*, 42. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yulia, M. (2013). Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2), 205–220. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143>